

KAJIAN PEMBERDAYAAN KOPERASI BERBASIS AKUNTANSI DAN PERENCANAAN PERMODALAN DI KOTA BOGOR

EMPOWERMENT OF COOPERATIVES IN BOGOR CITY BASED ON COOPERATIVE ACCOUNTING AND CAPITAL PLANNING

IC Kusuma^{1a} dan AB Setiawan¹

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16720
a Korespondensi: Indra Cahya Kusuma, Email: indracahyasmantibo84@gmail.com
(Diterima: 12-03-2014; Ditelaah: 16-03-2014; Disetujui: 19-02-2014)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the accounting ability, particularly in financial management, preparation of financial statements, and capital planning and management, of the cooperative management/businessmen in Bogor City. Cooperatives in Bogor were the object of this study. Sampling was done by using a purposive sampling and simple random sampling method. A total of 163 cooperatives were selected as samples. Data were analysed by using the multiple linear regression. Results showed that there was a simultaneous and partial effect of cooperative accounting and capital planning on the success of the empowerment of cooperatives in Bogor.

Key words: cooperative accounting, capital planning and empowerment.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pengurus/pelaku usaha Koperasi di Kota Bogor dalam bidang akuntansi, khususnya pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan serta perencanaan dan pengelolaan permodalan. Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor dengan objek penelitian Koperasi. Penarikan sampel menggunakan purposive sampling dan simple random sampling. Dengan jumlah sampel sebanyak 163 Koperasi. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian secara simultan dan parsial terdapat pengaruh akuntansi Koperasi dan perencanaan permodalan terhadap keberhasilan pemberdayaan Koperasi di Kota Bogor.

Kata kunci: akuntansi Koperasi, perencanaan permodalan dan pemberdayaan.

IC Kusuma dan AB Setiawan. 2014. Kajian pemberdayaan Koperasi berbasis akuntansi dan perencanaan permodalan di Kota Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora* 5(1): 36 - 42.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja serta mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Selain itu, peningkatan kualitas Koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

Berdasarkan catatan BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Bogor tahun 2011, UMKM dan

Koperasi mampu menyerap tenaga sebanyak 85,4 juta pekerja atau sekitar 96,8% dari jumlah tenaga kerja di Indonesia. Sedangkan nilai kontribusi UMKM dan Koperasi terhadap pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) telah mencapai Rp 1,778 triliun atau 53% dari total PDRB Indonesia. Berdasarkan data BPS Kota Bogor tahun 2011, potensi UKM antara lain dapat dilihat dari jumlah pelaku usaha yang relatif banyak, kemampuan yang menunjang kegiatan kepariwisataan dan kontribusi yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor. Dari segi Koperasi, jumlah yang terdata sampai dengan akhir tahun 2011 sebanyak 774 Koperasi dan jumlah UMKM yang masuk pembinaan Pemerintah Kota Bogor mencapai

32.901 UMKM. Begitu pula jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor UMKM, sampai tahun 2011 telah mencapai 58.249 orang, sedangkan dari jumlah aset investasi capaian UMKM ditahun 2011 berkisar pada angka Rp 575,397 miliar lebih.

Ada beberapa kendala dan keterbatasan Koperasi dan UMKM di Kota Bogor yang sampai saat ini relatif sulit berkembang dengan baik. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor antara lain: 1) terbatasnya akses, kapasitas dan kemampuan Koperasi dan UMKM untuk mengenali, memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya produktif; 2) rendahnya produktivitas mengakibatkan lemahnya daya saing Koperasi dan UMKM; 3) rendah kualitas kelembagaan atau formalisasi usaha; 4) rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi secara produktif, efektif dan efisien, serta lemahnya *entrepreneurship* dan kualitas SDM; 5) kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebutuhan masyarakat barat terutama Eropa. Sebagai sebuah konsep, *empowerment* masih bersifat umum, sehingga apabila tidak hati-hati kajian terhadap konsep ini diibaratkan seperti menyentuh cabang atau daun tetapi tidak menyentuh akar permasalahan baik yang sifatnya mendasar maupun yang terjadi dalam suatu proses.

Ada dikotomi antara memberdayakan dengan pemberdayaan yang dijelaskan oleh Sumodiningrat (1997). Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya, sedangkan pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memberi inovasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan memperkenalkan bahwa setiap masyarakat mempunyai potensi (berdaya) untuk berkembang;
2. memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*) dengan penyediaan input (masukan), serta

pembukaan akses ke berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang;

3. melindungi masyarakat dalam proses pemberdayaan, dengan mencegah yang lemah menjadi lemah.

Menciptakan suatu wilayah yang berdaya perlu adanya pemihakan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang diarahkan secara langsung pada akses rakyat kepada sumber daya pembangunan yang disertai penciptaan peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi.

Konsep *empowerment* muncul karena adanya kegagalan dan harapan yaitu gagalnya model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan dengan harapan adanya pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan gender, persamaan antara generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai (Friedman 1992).

Menurut Argyris (1998), pemberdayaan merupakan program yang mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan karena membutuhkan komitmen yang kuat. Keterkaitan yang kuat antara komitmen dan pemberdayaan disebabkan karena adanya keinginan dan kesiapan individu-individu dalam organisasi untuk diberdayakan dengan menerima berbagai tantangan dan tanggung jawab. Argyris membagi komitmen menjadi dua yaitu komitmen eksternal dan komitmen internal.

Komitmen eksternal dibentuk oleh lingkungan kerja. Komitmen ini muncul karena adanya tuntutan terhadap penyelesaian tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh para karyawan yang menghasilkan adanya *reward* dan *punishment*. Peran manajer sangat vital dalam menentukan timbulnya komitmen ini karena belum adanya kesadaran individual atas tugas yang diberikan. Sedangkan komitmen internal merupakan komitmen yang berasal dari diri seseorang untuk menyelesaikan berbagai tugas, tanggung jawab dan wewenang berdasarkan pada alasan dan motivasi yang dimilikinya. Munculnya komitmen internal sangat ditentukan oleh kemampuan pimpinan dan lingkungan organisasi dalam menumbuhkan sikap dan perilaku profesional dalam menyelesaikan tanggung jawab perusahaan.

Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha Koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Undang-undang No. 25/1992 pasal 1 berbunyi bahwa Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang otonomi yang dimiliki oleh para anggotanya sebagai rekanan atau pelanggan dari perusahaan Koperasi.

Karakteristik Koperasi

Hanel (1989) menyatakan bahwa karakteristik dasar dari organisasi Koperasi adalah sebagai berikut:

1. kesukarelaan untuk bekerja sama. Hal ini dapat berarti tidak ada keanggotaan yang bersifat keharusan secara tidak langsung atau secara bersyarat;
2. kesamaan hak dan kerjasama;
3. kebebasan yang cukup untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan individu.

Wirasasmita (1992) menyatakan bahwa untuk mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan berhasil sesuai dengan karakter dasarnya sekaligus dapat berkembang dalam situasi persaingan yang ketat. Kriteria pengembangan Koperasi dapat diukur dengan besarnya volume usaha, modal dan kegiatan usaha, serta nilai aset, baik yang dimiliki Koperasi maupun anggotanya.

Prinsip Koperasi menurut Hendar dan Kusnadi (2005:2) adalah sebagai berikut:

1. keanggotaan yang bersifat terbuka (*open memberships and voluntary*),
2. pengawasan secara demokratis (*democratic control*),
3. bunga yang terbatas atas modal (*limited interest of capital*),
4. pembagian SHU yang sesuai dengan jasa anggota (*proportional distribution of surplus*),
5. penjualan dilakukan sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara tunai (*trading in cash*),

6. tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, dan politik (*political, racial, religious neutrality*),
7. barang-barang yang dijual harus merupakan barang asli, tidak rusak atau palsu (*adulterated goods forbidden to sell*), dan
8. pendidikan kepada anggota secara berkesinambungan (*promotion of education*).

Akuntansi Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional (PSAK 27).

Foy (1994) telah mengungkapkan empat kemampuan atau *skill* manajerial yang perlu dimiliki oleh pemimpin suatu organisasi, yaitu:

1. *conceptual skills* yaitu kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi;
2. *human skills* yaitu kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok;
3. *administratif skills* yaitu kemampuan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia dan pengawasan;
4. *technical skills* yaitu kemampuan untuk menggunakan peralatan, prosedur atau teknik-teknik dari bidang tertentu, misalnya akuntansi, pemasaran, dan lain-lain.

Arens dan Loebecke (2003:13) mengatakan *accounting is the recording, classifying, and summarizing of economic events in a logical manner for the purpose of providing financial information for decision making*. Dengan demikian, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan.

Untuk mengetahui sejauh mana Koperasi dan mampu mengembangkan usahanya, dapat dilihat dari kondisi kinerjanya yang dapat diukur dari berbagai macam pendekatan tergantung dari sisi mana suatu analisis digunakan Hanel (1998). Hanel (1998) mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja Koperasi dibagi dalam dua bagian, yaitu: (1) analisis finansial yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, rasio profitabilitas, kegiatan usaha, permodalan, dan peranan usaha penunjang; (2) analisis non finansial yang dianalisis melalui partisipasi anggota, produktifitas karyawan dan manajer Koperasi.

Permodalan

Pada awalnya, orientasi pengertian modal adalah *physical oriented* (Riyanto 1995). Dalam pengertian ini, modal diartikan sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Menurut Riyanto (1995), modal dalam perkembangannya menjadi bersifat *non physical oriented* yakni pengertian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai, atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) memberikan batasan mengenai pengertian modal dalam dua jenis modal yaitu modal keuangan dan modal fisik. Menurut standar akuntansi keuangan, pengertian kedua konsep modal adalah: (1) menurut konsep modal keuangan seperti uang atau daya beli yang diinvestasikan, modal adalah sinonim dengan kata akatiba bersih atau ekuitas perusahaan; (2) konsep modal fisik seperti kemampuan usaha, modal dipandang sebagai kapasitas produktif

perusahaan yang didasarkan pada misalnya unit *output* perhari.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) penerapan akuntansi bagi Koperasi di Kota Bogor, (2) perencanaan permodalan bagi Koperasi di Kota Bogor, dan (3) pengaruh akuntansi dan perencanaan permodalan terhadap keberhasilan pemberdayaan Koperasi di Kota Bogor.

MATERI DAN METODE

Populasi dan Tehnik Pengambilan Sampel

Untuk mendapatkan data yang dapat mewakili, dilakukan penarikan sampel. Penarikan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* (kriteria tertentu) dan *simple random sampling* (Natsir 2003). Pengambilan sampel pertama didapat dari populasi umum Koperasi sebanyak 724 buah pelaku usaha Koperasi di Kota Bogor berdasarkan data Biro Pusat Statistik Kota Bogor 2011.

Kriteria jumlah Koperasi yang masuk sebagai binaan dan terdata di Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor sampai dengan tahun 2012 ada sebanyak 275 Koperasi aktif. Dengan menggunakan *simple random sampling* maka diperoleh sampel sasaran sebanyak 163 Koperasi.

Definisi Operasional Variabel

Tabel 1 menunjukkan definisi operasional masing-masing variabel penelitian.

Tabel: 1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep variabel	Indikator	Skala ukur
Pengetahuan akuntansi koperasi (X1)	Pengetahuan tentang akuntansi koperasi adalah segala informasi yang diketahui baik yang diperoleh dari hasil belajar maupun dari pengalaman secara langsung maupun tidak langsung meliputi: prinsip, metode, dan prosedur tentang akuntansi koperasi, dalam hal ini adalah standar akuntansi perkoperasian (PSAK No. 27).	1. Dapat menyusun laporan keuangan	Ordinal
		2. Pencatatan transaksi di buku harian	Ordinal
		3. Pencatatan transaksi di buku jurnal	Ordinal
		4. Pencatatan transaksi di buku besar	Ordinal
		5. Penyajian laporan keuangan	Ordinal

Perencanaan permodalan (X ₂)	Melakukan perencanaan penggunaan modal koperasi yang terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman (UU tentang Koperasi No. 25/1992).	1. Perencanaan penggunaan dana 2. Modal sendiri 3. Dana cadangan usaha 4. Bantuan dari lembaga pemerintah 5. Kemudahan memperoleh pinjaman 6. Modal pinjaman	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal
Keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM (Y)	Keberhasilan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang dilakukan dan menggambarkan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.	1. Adanya perencanaan 2. Peningkatan laba 3. Peningkatan dana 4. Peningkatan usaha 5. Peningkatan aset 6. Pelatihan dan pendidikan 7. Kerjasama 8. Kontribusi pembangunan 9. Kesejahteraan anggota atau karyawan	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal

Tehnik Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan bersifat deskriptif kuantitatif. Penelitian bersifat deskriptif adalah penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi objek penelitian (kondisi Koperasi dan UMKM dilihat dari akuntansi koperasi apakah sudah dijalankan, terutama penyusunan laporan keuangan serta aspek perencanaan permodalan). Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah dengan menggunakan statistik regresi linier berganda (*multiple regression linier*), dengan maksud untuk melihat keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan UMKM berbasis akuntansi koperasi dan perencanaan modal (Sugiono 2007). Rumusan uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = S_0 + S_1X_1 + S_2X_2 + v$$

Keterangan: β_0 = konstanta; β_1, β_2 = koefisien regresi; X_1 = akuntansi koperasi; X_2 = perencanaan permodalan; Y = keberhasilan pemberdayaan koperasi; ε = error atau variabel pengganggu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Model Regresi (Uji F)

Hasil pengujian pada tabel 2 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 42,069 ditentukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,5 ($\alpha = 5\%$), sedangkan nilai F_{tabel} diperoleh sebesar 3,09. Dengan membandingkan nilai $F_{hitung} (56,990) > F_{tabel} (3,09)$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal itu berarti dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari faktor akuntansi koperasi dan perencanaan permodalan terhadap keberhasilan pemberdayaan koperasi.

Tabel 2. Pengujian koefisien regresi secara simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2102,678	2	1051,33942	42,069	0,000 ^b
1 Residual	2923,914117	24	121,830		
Total	5026,592119				

a. dependent variable: keberhasilan pemberdayaan;
b. predictors: (constant), perencanaan modal, akuntansi koperasi.

Pengujian Model Regresi (Uji t)

Pengaruh Faktor Akuntansi Koperasi (X₁) Terhadap Keberhasilan Pemberdayaan Koperasi (Y)

Hasil pengujian pada Tabel 3 diperoleh nilai t_{hitung} untuk faktor akuntansi koperasi sebesar 3,199 ditentukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,5 ($\alpha = 5\%$), sedangkan nilai t_{tabel} dengan derajat bebas (db) 2 untuk pengujian dua sisi diperoleh sebesar 1,980. Dengan membandingkan nilai t_{hit} (3,199) > t_{tab} (1,980) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari

Tabel 3. Pengujian koefisien regresi secara parsial

Model	Coefficients(a)		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients				
	B	Std. Error			
(Constant)	27,684	3,789		7,306	,000
1 Akuntansi koperasi	,244	,076	,230	3,199	,002
Perencanaan modal	,890	,113	,563	7,851	,000

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha Koperasi di Kota Bogor sebagian sudah menerapkan akuntansi dengan benar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, serta menyusun laporan keuangan secara berkala atau periodik, dan sebagian sudah merencanakan permodalan dengan baik.. Secara simultan dan parsial terdapat pengaruh akuntansi Koperasi dan perencanaan permodalan terhadap keberhasilan pemberdayaan Koperasi di Kota Bogor.

Adanya kebijakan dari pemerintah daerah Kota Bogor berupa aturan-aturan yang lebih mempermudah pelaku usaha Koperasi terutama dalam mengakses pendanaan dari lembaga perbankan. Perlunya dukungan secara berkesinambungan oleh intitusi pemerintah dibantu oleh institusi pendidikan serta lembaga di luar pemerintahan yang terkait dengan permasalahan Koperasi yang relatif sulit untuk berkembang berupa pelatihan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi dalam penyusunan

faktor akuntansi koperasi terhadap keberhasilan pemberdayaan Koperasi.

Pengaruh Faktor Perencanaan Permodalan (X₂) Terhadap Keberhasilan Pemberdayaan Koperasi (Y)

Hasil pengujian pada Tabel 3 diperoleh nilai t_{hitung} untuk faktor perencanaan permodalan sebesar 7,851 ditentukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,5 ($\alpha = 5\%$), sedangkan nilai t_{tabel} dengan derajat bebas (db) 2 untuk pengujian dua sisi diperoleh sebesar 1,980. Dengan membandingkan nilai t_{hit} (7,851) > t_{tab} (1,980) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari faktor perencanaan permodalan terhadap keberhasilan pemberdayaan Koperasi.

akuntansi keuangan dan perencanaan permodalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens AA and Loebecke. 2003. Auditing. Precentin Hall, New York.
- Argyris C. 1998. Emporwerment: the emperor new clother. *Harvard Business Review*, May-Jun, p.100.
- Badan Pusat Statistik Kota Bogor. 2011. Kota Bogor dalam angka 2009-2011. BPS, Bogor.
- Foy N. 1994. Empowering people at work. Grower Publishing Company, London.
- Friedman J. 1992. Empowerment, the politics of alternative development. Oxford University Press, USA.
- Hanel A. 1989. Pokok-pokok pikiran mengenai organisasi koperasi dan kebijakan pengembangan di negara-negara berkembang. Edisi Pertama, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Hendar dan Kusnadi. 2005. Ekonomi koperasi, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.

- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar akuntansi keuangan. Salemba Empat, Jakarta.
- Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM No.129/Kep/M.KUKM/XI/2002/Tanggal 19 November 2002 tentang pedoman klasifikasi koperasi.
- Natsir M. 2003. Metode penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Riyanto B. 1995. Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan. BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2007. Metode penelitian. Alfabeta, Bandung.
- Tambunan T. 2002. Usaha kecil dan menengah di Indonesia beberapa isu penting. Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
- Wirasmita Y. 1992. Strategi pembangunan sektor koperasi yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan koperasi. UPT Penelitian Bandung, Bandung.